

**ISU KESEJAHTERAAN HEWAN  
DALAM HUBUNGAN BILATERAL INDONESIA-AUSTRALIA**

**ANIMAL WELFARE ISSUES  
IN INDONESIA-AUSTRALIA BILATERAL RELATIONS**

**Adirini Pujayanti\*\***

Naskah diterima 31 Januari 2013, disetujui 16 Maret 2013

*Abstract*

*Animal welfare is one of the new issues in international relations that needs attention. Each country can have implementing domestic policies and different to the issue of animal welfare. The issue is bring a consequences of the interaction among countries, including bilateral relations between Indonesia - Australia. This study shows that this new international issues can lead to continuity and change in inter-state relations. Countries that are living in the same area have of potential conflict is greater than far-flung countries. Animal welfare policy differences between Indonesia and Australia to lead to political tensions in bilateral relations. Political tensions eased because the same economic interest from both countries.*

*Keyword: animal welfare, bilateral relations, Indonesia, Australia*

**Abstrak**

Kesejahteraan hewan merupakan salah satu isu baru dalam hubungan internasional yang perlu menjadi perhatian. Setiap negara dapat mempunyai kebijakan dan implementasi domestik yang berbeda-beda terhadap isu kesejahteraan hewan. Isu tersebut membawa konsekuensi baru terhadap interaksi antar-negara, termasuk hubungan bilateral Indonesia - Australia. Penelitian ini menunjukkan bahwa isu baru ini dapat menyebabkan terjadinya kesinambungan dan perubahan dalam hubungan antar-negara. Negara-negara yang terletak berdekatan

---

\* Tulisan ini merupakan ringkasan laporan penelitian individu tentang "Isu Kesejahteraan Hewan dalam Hubungan Indonesia-Australia" yang dilakukan pada tahun 2012.

\*\* Peneliti Madya Masalah-Masalah Hubungan Internasional di Pusat Pengkajian, Data, dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI. Alamat e-mail : [apujayanti@yahoo.com](mailto:apujayanti@yahoo.com).

dalam suatu kawasan memiliki potensi konflik yang lebih besar dibanding negara yang saling berjauhan. Perbedaan kebijakan kesejahteraan hewan antara Indonesia dengan Australia menyebabkan terjadinya ketegangan politik dalam hubungan bilateral kedua negara. Ketegangan politik mereda karena adanya kepentingan ekonomi yang sama.

Kata kunci: kesejahteraan hewan, hubungan bilateral, Indonesia, Australia.

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Pada pertengahan tahun 2011 hubungan bilateral Indonesia – Australia sempat terganggu, setelah Australia menghentikan secara sepihak ekspor ternak sapi ke Indonesia. Kebijakan Australia tersebut ditempuh setelah penayangan penyiksaan sapi Australia sebelum akhirnya hewan tersebut disembelih di rumah pemotongan hewan Indonesia. Tayangan yang sangat bertentangan dengan kaidah kesejahteraan hewan (*animal welfare*) atau biasa disingkat kesrawan tersebut disiarkan televisi *ABC Four Corners* merupakan hasil investigasi dua organisasi penyayang binatang Australia ke 11 rumah pemotongan hewan (RPH) di Indonesia di bulan Juni 2011. Akibat dari tayangan tersebut muncul desakan dari LSM dan masyarakat Australia untuk menghentikan ekspor sapi hidup ke Indonesia. Ekspor sapi Australia ke Indonesia sempat terhenti selama satu bulan, namun dipulihkan kembali karena dianggap merugikan industri peternakan Australia.

Saat ini kesrawan telah berkembang menjadi isu yang sangat kompleks karena memiliki dimensi ekonomi dan politik. Dalam perkembangannya ada kekhawatiran bahwa aspek kesrawan diarahkan menjadi isu dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini aspek kesrawan digunakan bukan dengan maksud memberikan perlindungan kepada hewan, tetapi untuk melakukan kebijakan proteksionisme di era globalisasi.<sup>1</sup> Isu kesrawan semakin menjadi penting karena kepatuhan terhadap standar internasional dalam hal tersebut tidak hanya menjadi kesempatan peningkatan teknologi, tetapi juga pembukaan akses pasar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>A.C.D Bayvel, "The globalization of animal welfare: A New Zealand and Australia perspective on recent developments of strategic importance", 2009, [http://www.daft.gov.au/data/assets/pdf\\_file/0011/1046729/08-david-bayvel.pdf](http://www.daft.gov.au/data/assets/pdf_file/0011/1046729/08-david-bayvel.pdf), diakses 2 Maret 2012.

<sup>2</sup>"Animal Welfare = Trade Issue", <http://animal-law.biz/node/328>, diakses 28 Maret 2012.

Australia merupakan negara yang memiliki kesadaran tinggi dan menjadi panutan dalam pelaksanaan kesrawan sesuai standar internasional. Australia terus berinovasi dalam program dan penelitian untuk meningkatkan standar kesejahteraan hewan di negaranya.<sup>3</sup> Berkat penerapan standar kesejahteraan hewan yang baik hewan ternak Australia dikenal bermutu tinggi dan bebas dari berbagai penyakit, sehingga sektor peternakan menjadi salah satu andalan pendapatan negara tersebut dan membuka lapangan kerja bagi sekitar 10.000 orang di daerah pedesaan Australia.<sup>4</sup> Pemerintah Australia mendukung industri peternakan yang dinamis dan modern. Sebagai tindak lanjut Australia terus berupaya meningkatkan kualitas kesrawan domestik dan berupaya menerapkan pemahaman tersebut kepada mitra dagangnya di luar negeri.

Berbeda dengan Australia, masyarakat Indonesia secara umum belum mengenal dan mengapresiasi prinsip-prinsip kesrawan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, pemerintah Indonesia telah mengatur isu ini dalam UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Indonesia juga memiliki standar halal yang juga sudah memasukkan prinsip kesrawan. Perbedaan pandangan kedua negara dalam isu kesrawan tersebut mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Upaya untuk membina saling pengertian sangat dibutuhkan dalam mengatasi perbedaan pandangan ini

## **B. Perumusan Masalah**

Dewasa ini, perdagangan hewan berlangsung semakin kerap, cepat, dan bersifat lintas batas sehingga terjadi peningkatan *common vulnerability* atas ancaman kesrawan. Beranjak dari pengertian ini, menjadi penting bagi kita untuk mensinergikan masalah ini dalam pembahasan maupun pengambilan keputusan politik luar negeri. Karena pada akhirnya penciptaan kerja sama bidang kesrawan adalah suatu hal yang mutlak dan tidak bisa ditawar lagi.

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana isu kesrawan mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Australia. Perkembangan kesrawan sebagai sebuah isu global akan terus bergulir. Meskipun kesrawan dipandang relatif baru di Indonesia, penerapannya dengan benar dapat meningkatkan citra bangsa Indonesia di mata dunia. Di lain pihak kesalahan yang dilakukan Indonesia dalam masalah ini juga dapat menjadikan Indonesia sebagai sasaran kritik internasional. Oleh

<sup>3</sup> "MLA's Animal Welfare Program", Home /About the red meat industry/Animal welfare <http://www.mla.com.au/About-the-red-meat-industry/Animal-welfare>, diakses 2 Maret 2012.

<sup>4</sup> "Australia's live export industry", <http://www.daff.gov.au/animal-plant-health/welfare/animal-welfare-issues/australias-live-export-industry>, diakses 26 Januari 2012.

karena itu dibutuhkan komitmen kuat dari semua pemangku berkepentingan untuk terlaksananya kesejahteraan hewan di Indonesia.

Berdasarkan permasalahan di atas muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah *animal welfare* dan bagaimana pengaruhnya dalam perdagangan hewan internasional?
2. Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *animal welfare* di Australia dan Indonesia?
3. Bagaimana perbedaan implementasi prinsip kesejahteraan hewan di masing-masing negara mempengaruhi hubungan bilateral kedua negara?

### C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk lebih memahami *animal welfare* dan mengetahui pengaruhnya dalam perdagangan hewan internasional, implementasi dan pengaruhnya terhadap hubungan bilateral dua negara.

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah dalam mengelola masalah-masalah kebijakan luar negeri dan perdagangan terkait kesejahteraan hewan, serta menjadi masukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### D. Kerangka Pemikiran

Globalisasi telah membawa suatu *trend* baru, yaitu munculnya isu-isu baru yang perlu menjadi perhatian bersama. Sejak berakhirnya Perang Dingin yang ditandai dengan penurunan ancaman militer terhadap kedaulatan negara, fokus perhatian mulai diarahkan pada isu keamanan non tradisional. Isu-isu sentral dalam perspektif keamanan non tradisional lebih luas bukan persoalan militer dan perang semata-mata.<sup>5</sup> Masalah-masalah yang sebelumnya merupakan isu *low politics* yang kurang mendapat perhatian, sekarang ini semakin berkembang secara signifikan. Munculnya isu-isu baru yang secara signifikan telah mengubah dunia dan membawa konsekuensi-konsekuensi baru terhadap interaksi antar negara. Setiap negara mempunyai pandangan masing-masing terhadap isu internasional yang muncul. Dengan demikian dapat terjadi perbedaan pandangan antar negara dalam menanggapi satu isu yang sama.

---

<sup>5</sup> Bob Sugeng Hadiwinata, "Transformasi Isu dan Aktor di dalam Studi Hubungan Internasional: Dari Realisme Hingga Konstruktivisme" dalam *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional- Aktor Isu dan Metodologi*, Yulius P. Hermawan (ed.), Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, him. 7 – 15.

Dalam pelaksanaannya setiap kebijakan luar negeri suatu negara ditempuh dengan dengan taruhan tinggi, ketidakpastian dan risiko yang besar. Kebijakan suatu negara terhadap isu yang mempengaruhi kebijakan luar negerinya, dipilih oleh pengambil keputusan dengan mengacu pada pilihan individu, kelompok, dan koalisi. Adapun pertimbangan terhadap pilihan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan luar negeri tersebut, yaitu lingkungan pengambil keputusan, faktor psikologis, faktor internasional dan pengaruh dalam negeri.<sup>6</sup>

Dalam hubungan internasional kontemporer seperti yang terjadi saat ini, hubungan bilateral Indonesia dan Australia yang fluktuatif dapat dianalisa dengan melihat pola-pola hubungan yang mengindikasikan adanya kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*). Seperti yang dikatakan Toma dan Gorman bahwa:

"Faktor pendukung utama untuk kesinambungan (*continuity*) hubungan internasional adalah aktor negara bangsa, yang dengan atribut kedaulatan dan penggunaan power untuk meraih kepentingan nasional berupaya untuk mempertahankan perannya sebagai aktor utama dalam hubungan internasional. Sedangkan pendukung perubahan (*change*) adalah globalisasi ekonomi, kemajuan teknologi, ancaman terhadap lingkungan, peningkatan power dan influence dari aktor non-negara".<sup>7</sup>

Isu *animal welfare* atau kesejahteraan hewan mulai menjadi perhatian dunia sejak tahun 1970-an. Isu kesejahteraan hewan muncul dari keprihatinan etika dan kritikus sosial mengenai cara masyarakat memelihara dan memperlakukan hewan. Pengetahuan kesejahteraan hewan berupaya untuk menyediakan kerangka kerja yang akan membantu manusia untuk memahami dan mengartikulasikan hubungan yang tepat dengan hewan dan mengimplementasikannya ke dalam tindakan yang sesuai.

Isu ini menekankan perlakuan baik terhadap hewan dengan cara-cara yang empiris. Cara manusia memperlakukan hewan berbeda-beda karena adanya perbedaan tradisi, budaya, agama, keyakinan masyarakat atau negara. Hal tersebut membawa konsekuensi terhadap kehidupan hewan

---

<sup>6</sup> Jonathan and Stanley Renshon, "The Theory and Practice of Foreign Policy Compliance: A Longitudinal Analysis", dalam Alex Mintz and Karl De Rouen Jr. (ed.). *Understanding Foreign Policy Decision Making*, Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010, hlm. 3.

<sup>7</sup> Peter A. Toma and Robert F. Gorman, "International Relations: Understanding Global Issues", dalam Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: Penerbit Rosdakarya, 2005, hlm. 8-12.

menyebabkan banyak hewan menderita dan mati akibat kurang tauhan masyarakat dalam memperlakukan mereka. Hal ini menimbulkan keprihatinan dan upaya untuk memperlakukan hewan dengan cara yang lebih baik yang dapat diterima oleh semua pihak. Oleh sebab itu, isu kesejahteraan hewan sangat menekankan manusia untuk memperlakukan hewan dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Isu ini juga memperhatikan aspek tradisi dalam memperlakukan hewan, menilai baik dan buruk perlakuan manusia terhadap hewan dengan cara empiris dan menekankan manusia untuk memperlakukan hewan secara pantas berdasarkan pengelompokan jenis hewan.<sup>8</sup>

Indonesia dan Australia adalah dua negara yang bertetangga, sehingga tidak dipungkiri akan mudah terjadi gesekan kepentingan diantara keduanya. Sebagaimana dinyatakan *Michael Haas*, bahwa negara-negara yang saling berdekatan dalam suatu kawasan pada dasarnya memiliki potensi konflik yang jauh lebih besar satu sama lain dibanding yang saling berjauhan.<sup>9</sup> Pengaruh isu kesrawan tersebut terlihat mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia-Australia di bidang ekonomi dan politik. Perbedaan pola perlakuan terhadap hewan diantara masyarakat di kedua negara yang berbeda, dan keinginan Australia menghentikan impor sapi ke Indonesia dianggap merupakan intervensi ke dalam urusan dalam negeri Indonesia. Ketegangan politik diantara kedua negara berakhir dengan baik karena adanya persamaan kepentingan ekonomi.

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Waktu dan Tempat

Penelitian secara menyeluruh, termasuk penelitian kepustakaan dan penyusunan laporannya dilakukan dalam rentang waktu Februari-November 2012. Lokasi yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah Jakarta untuk menggali informasi terkait dengan kebijakan pemerintah terhadap masalah kesrawan. Sedangkan penelitian di daerah dilakukan di Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Nusa Tenggara Barat karena kedua provinsi merupakan daerah sentra peternakan dan penghasil daging sapi di Indonesia.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> David Fraser, "Animal Ethics and Animal Welfare Science: Bridging the Two Cultures", in *Elsevier, Applied Animal Behaviour Science*, Vol.65, Issue 3, Desember 1999, p.. 179-189.

<sup>9</sup> Ambarwati, "Aplikasi Teori Integrasi dalam Hubungan Internasional: Eropa dan Asia Timur", dalam Azrudin dan Mirza Jaka Suryana, (Eds), "Refleksi Teori Hubungan Internasional, dari Tradisional ke Kontemporer", Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009. hlm. 137.

<sup>10</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. *Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, 2011, hlm. 150.

## 2. Bahan dan Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka untuk mendapatkan data sekunder terkait masalah yang hendak dibahas dalam penelitian ini. Setelah memperoleh data yang diperlukan penelitian dilanjutkan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak yang terkait, di antaranya Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Bappeda, Kadin, Asosiasi Pengusaha Importir Daging, akademisi fakultas peternakan, pengelola RPH, dan karantina hewan.

## 3. Metode Analisis Data

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu kualitatif deskriptif–analisis, maka data yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## II. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Prinsip Kesejahteraan Hewan dalam Perdagangan Internasional

Perdagangan sapi antar negara semakin meningkat di era globalisasi saat ini. Kurang lebih sepuluh milyar sapi disembelih untuk konsumsi penduduk dunia setiap tahun. Hal ini menyebabkan perhatian terhadap masalah kesrawan tersebut turut meningkat. Pelaksanaan kesejahteraan hewan mengacu kepada *Brambell five freedoms* yang diadopsi pada 1979 dan menjadi acuan umum bagi kesejahteraan semua jenis hewan secara internasional.<sup>11</sup> Lima prinsip kesrawan tersebut mencakup bebas dari rasa haus dan lapar, bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, cedera dan penyakit, bebas mengekspresikan perilaku normal serta bebas dari rasa takut dan tertekan.<sup>12</sup>

Pada dasarnya kesrawan adalah upaya memperlakukan hewan secara wajar, alami dan terkendali dalam kerangka perlindungan hewan dari tindak semena-mena manusia.<sup>13</sup> Acuan internasional dalam isu kesejahteraan hewan adalah ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh organisasi kesehatan hewan dunia yaitu *World Animal Health Organization* (WAHO)

<sup>11</sup>"Five Freedoms", <http://www.defra.gov.uk/fawc/about/five-freedoms/> "Five freedoms". Farm Animal Welfare Committee, diakses 28 Maret 2012.

<sup>12</sup>"Animal health, welfare & biosecurity", <http://www.mla.com.au/Livestock-production/Animal-health-welfare-and-biosecurity>, diakses 2 Maret 2012.

<sup>13</sup>Wawan Sution, Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan, 21 Juli 2011, 14 September 2011, [http://karantina.deptan.go.id/index.php?option=com\\_content&view=article&id=175:penyelenggaraan-kesejahteraan-hewan&catid=45:opini](http://karantina.deptan.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=175:penyelenggaraan-kesejahteraan-hewan&catid=45:opini), diakses 28 Maret 2012.

yang juga dikenal dengan nama *Office International des Epizooties* (OIE). Organisasi internasional yang telah berdiri sejak tahun 1924 dan beranggota 178 negara ini, berupaya meningkatkan kesrawan melalui pendekatan berdasarkan kaidah ilmiah dengan memisahkan masalah kesejahteraan hewan dari praktek-praktek budaya atau situasi ekonomi di suatu negara.<sup>14</sup> Standar kesrawan dibuat secara teratur diperbarui setiap tahun dengan memperhitungkan temuan-temuan ilmiah terbaru.

Dalam pelaksanaannya kesrawan yang paling mendapat sorotan adalah perlakuan terhadap hewan ternak, karena terkait kepentingan ekonomi perdagangan ternak antar negara. Penerapan kesrawan terhadap hewan ternak dimulai dari area peternakan hingga menuju ke meja makan diistilahkan dengan "*from farm to fork*".<sup>15</sup> Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) mulai merintis pembuatan standar-kesrawan pada 2001 dan secara resmi diperkenalkan kepada negara anggota pada 2004. Setiap negara anggota OIE diharapkan mematuhi karena OIE sendiri tidak menjatuhkan sanksi kepada pelanggaran anggotanya (*non legally binding*). Namun, setiap negara anggotanya diwajibkan membuat peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan *guidance* OIE. Dengan menerjemahkannya ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan sifatnya akan mengikat masyarakat.

Isu kesrawan telah masuk ke dalam perjanjian perdagangan bebas. Kepatuhan negara untuk memenuhi standar kesrawan dapat menjadi akses untuk membuka maupun menutup pasar. Isu kesrawan juga kerap kali diberlakukan sebagai *tarriief measurres* dalam perdagangan internasional dengan menerapkan standar yang tinggi dalam perdagangan ternak di era perdagangan bebas saat ini.<sup>16</sup> Keterkaitan prinsip kesrawan dengan perdagangan internasional terlihat dalam kerjasama WTO dan OIE dalam penggunaan standar internasional dalam konteks Perjanjian SPS. Aspek kesehatan dari kesepakatan SPS pada intinya bertujuan melindungi kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan dengan menerapkan ketentuan-ketentuan untuk mengelola risiko yang berhubungan dengan impor.<sup>17</sup> Ketentuan tersebut biasanya dalam bentuk persyaratan karantina atau keamanan pangan. Kesepakatan SPS juga disepakati agar tidak menimbulkan efek negatif hadap

<sup>14</sup> "Director General Office", <http://www.oie.int/en/about-us/director-general-office/> diakses 28 Maret 2012.

<sup>15</sup> Editorial, *Bulletin* No.2 tahun 2008, [http://www.oie.int/fileadmin/home/eng/Publications\\_%26\\_Documentation/docs/pdfBull\\_2008\\_2\\_ENG.pdf](http://www.oie.int/fileadmin/home/eng/Publications_%26_Documentation/docs/pdfBull_2008_2_ENG.pdf), diakses 2 Maret 2012.

<sup>16</sup> Maudi Isranayanti, Kepala Seksi Australia dan Pasifik Direktorat Jenderal KPI Kementerian Perdagangan, dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan P3DI tanggal 24 April 2012.

<sup>17</sup> "Kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Sanitari dan Fitosanitari", [http://www.daff.gov.au/data/assets/pdf\\_file/0007/146896/wto\\_sps\\_agreement\\_booklet.pdf](http://www.daff.gov.au/data/assets/pdf_file/0007/146896/wto_sps_agreement_booklet.pdf), diakses 27 Februari 2012.

perdagangan internasional sehingga tidak dapat digunakan untuk bertindak diskriminatif maupun membatasi perdagangan internasional.

Anggota WTO berhak menetapkan ketentuan SPS untuk negara masing-masing dengan tetap mengacu pada persyaratan yang ada dalam kesepakatan SPS. Oleh karenanya setiap negara mempunyai standar nasional dan regulasi teknis masing-masing, yang dalam implementasinya dapat merupakan hambatan teknis bagi negara lain dalam perdagangan. WTO berupaya untuk menghindari hambatan teknis perdagangan diantara anggotanya dengan mengembangkan standar, regulasi teknis dan penilaian kesesuaian yang mengacu kepada standar dan pedoman yang dikembangkan oleh organisasi internasional yang relevan.<sup>18</sup> Dalam Kesepakatan SPS, lembaga internasional yang menjadi acuan di bidang kesehatan hewan adalah standar yang dibuat OIE. Penting untuk dicatat bahwa WTO mengharapkan bahwa negara, terutama negara-negara berkembang, diberi waktu dan bantuan untuk memenuhi berbagai jenis peraturan perdagangan internasional.

Di lain pihak WTO tidak bisa mempengaruhi keputusan satu negara untuk menghentikan sementara ekspor ternak sapi ke negara tertentu dengan alasan kesrawan<sup>19</sup>. Namun demikian WTO dapat membenarkan pembatasan perdagangan oleh suatu negara untuk melindungi populasi dari gangguan kesehatan dan keamanan nasionalnya. WTO baru akan bertindak menyelesaikan masalah tersebut jika ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan mengajukan permohonan ke badan penyelesaian sengketa WTO. Dalam hal ini bila terjadi sengketa terkait kesrawan, kedua negara diminta mengatasi masalah tersebut melalui konsultasi bilateral. Sampai saat ini, masalah perlindungan hewan yang paling dipertimbangkan oleh WTO adalah yang terkait dengan isu kelestarian lingkungan khususnya hewan yang terancam punah.

Negara-negara AS dan Eropa Barat, khususnya Inggris, merupakan pendukung isu kesrawan. Dukungan kuat Inggris terhadap isu ini kemudian menyebar ke negara-negara persemakmurnya, dan tumbuh kuat terutama di Australia. Pada pemerintah pengaruh tersebut muncul sebagai kebijakan yang mengutamakan kesrawan, sedangkan pada LSM berpengaruh melahirkan sikap yang militan yang mampu mempengaruhi kebijakan pemerintah. Peran LSM semacam ini sangat kuat dalam melobi, mengadvokasi, mengajukan petisi, atau kampanye protes terhadap pemerintahan negara mana pun yang dituduh tidak memperhatikan hak hidup dan perlindungan hewan. LSM-LSM tersebut mendapat

---

<sup>18</sup> "World Trade Organization", <http://www.bsn.go.id/bsn/activity.php?id=195>, diakses 28 Maret 2012.

<sup>19</sup> WTO Tak Campuri Pembatasan Ekspor Sapi Australia <http://arsip.gatra.com/2011-07-01/artikel.php?id=149175>, diakses 15 Juni 2011.

dukungan dana dari komunitas penyayang binatang di seluruh dunia dan menjadi aktor non-negara yang berpengaruh dalam hubungan internasional.<sup>20</sup> Sebagai contoh, LSM pemerhati kesrawan di Australia mampu mempengaruhi pemerintahnya untuk menghentikan ekspor ternak ke Mesir maupun Indonesia.

## **2. Implementasi Prinsip Kesejahteraan Hewan**

### **a. Australia**

Peternakan di Australia dikelola secara modern dalam skala besar, sehingga lebih efisien dan nilai tambah yang diperoleh lebih besar. Industri peternakan sapi di Australia memiliki latar belakang yang panjang, dimulai ketika orang-orang Eropa pertama kali datang ke Australia, mereka harus menghasilkan makanan sendiri karena belum terbiasa mengonsumsi hewan dan tumbuhan yang dijumpai di Australia. Sebagai sumber makanan mereka membawa hewan dan tumbuhan yang sudah mereka kenal dari Eropa, dan berhasil menghasilkan cukup makanan untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maka berkembanglah pertanian dan peternakan komersial bergaya Eropa di lahan pertanian yang luas. Pada saat Inggris menjadi negara industri, sebagai daerah jajahan Australia menjadi penghasil makanan bagi Inggris. Australia menjadi negara pertama yang memproduksi daging untuk diekspor di kapal laut yang bermesin pendingin.<sup>21</sup>

Peternakan sapi merupakan kontributor penting bagi perekonomian nasional Australia. Industri sapi di negara ini bebas dari berbagai gangguan penyakit hewan, dan mutu daging sapi Australia terkenal berkualitas tinggi. Daerah peternakan sapi berada di kawasan pedesaan daerah tropis di Australia sebelah utara dan di daerah beriklim sedang di selatan. Peternakan di daerah-daerah tersebut sangat luas dan dikelola secara modern. Beberapa peternakan atau yang disebut 'station' luasnya mencapai 29.000 kilometer persegi dan jumlah ternaknya dapat mencapai 50.000 ekor. Melihat luas peternakan di beberapa daerah peternakan, para petani menggunakan helikopter, pesawat terbang ringan, dan kendaraan bermotor untuk menggiring ternaknya. Ternak tersebut dimasukkan ke dalam kereta dan dibawa ke tempat penyembelihan untuk disembelih dan diolah.

Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, kesadaran akan kesehatan dan kebutuhan akan makanan berkualitas baik yang terus meningkat menjadi promosi yang baik bagi meluasnya kesrawan di seluruh dunia. Di negara-negara maju makanan yang berasal dari hewan yang sejahtera dianggap

---

<sup>20</sup> Steven L. Spiegel, *et.al*, *World Politics In A New Era*, (Fourth Edition), NY, Oxford Univ. Press, 2009, p. 549-552.

<sup>21</sup> <http://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab05/>, diakses 29 Januari 2013.

lebih berkualitas sehingga memiliki label khusus dan harga yang lebih baik.<sup>22</sup> Kesadaran tersebut terus disebarakan ke seluruh dunia dan berpengaruh pada perlakuan terhadap hewan ternak sebagai salah satu sumber pangan manusia. Industri peternakan sapi di Australia memperlakukan kesrawan dengan ketat untuk mempertahankan dan meningkatkan keuntungan. Efek stres dan cedera akan terlihat pada karkas yang dihasilkan karena daging akan berubah warna ungu gelap, berbeda dengan daging sapi sehat warna merah terang.<sup>23</sup> Daging dengan kualitas rendah ini akan disingkirkan karena tidak memenuhi standar dan sesuai dengan keinginan konsumen.<sup>24</sup>

Prinsip kesrawan Australia dilaksanakan sesuai dengan *the Brambell Five* sebagai berikut:

1. Bebas dari Lapar dan Haus - dengan akses siap untuk air tawar dan diet untuk menjaga kesehatan dan kekuatan penuh.
2. Bebas dari Rasa tidak nyaman - dengan menyediakan lingkungan yang sesuai termasuk tempat berlindung dan area istirahat yang nyaman.
3. Kebebasan dari rasa sakit, Cedera atau Penyakit - dengan pencegahan atau diagnosis cepat dan perawatan.
4. Kebebasan untuk Ekspresikan Perilaku Normal - dengan menyediakan ruang dan fasilitas kandang yang cukup, dan pengelompokan hewan.
5. Bebas dari Ketakutan dan stres - dengan menghindari penderitaan mental dan pengobatan yang aman

Dalam pelaksanaannya pemerintah Australia memberikan perhatian besar kepada industri peternakan mereka melalui sejumlah peraturan mengenai perlakuan terhadap hewan dan industri daging. Pelaksanaan prinsip kesrawan dilakukan sangat ketat melalui pemberlakuan *Model Code of Practice for The Welfare of Animals* dan *Livestock at Slaughtering Establishments Model Code* yang khusus berkaitan dengan penanganan pra penyembelihan, termasuk pembongkaran dan penanganan dalam penyimpanan ternak. Pencegahan stres dan cedera sebelum penyembelihan diketahui mampu meningkatkan kualitas daging yang dihasilkan. Beberapa hal yang cukup ditekankan dalam peraturan ini adalah upaya pencegahan stres pada ternak sebelum penyembelihan. Hal-hal yang diatur diantaranya pencegahan penggunaan anjing dan alat listrik dalam penggembalaan, kewajiban pemberian pakan, dan pengadaan naungan dengan ruang dan ventilasi yang cukup. Setibanya di pejagalan ternak sapi tidak boleh langsung disembelih, tetapi harus diistirahatkan dengan jangka waktu minimal dua jam

<sup>22</sup> "Animal welfare labeling", <http://animal-law.biz/node/35>, diakses 28 Maret 2012.

<sup>23</sup> Gregory NG, *Animal Welfare and Meat Production*, Cromwell:Trowbridge, 2007, p. 213.

<sup>24</sup> Meat & Livestock Australia, *Meat Standards Australia Beef Information Kit*, 2007, p.17.

sebelum disembelih. Sapi yang mengalami proses transportasi lebih dari enam jam harus diistirahatkan lebih lama lagi. Untuk menghindari cedera sebelum penyembelihan, kandang sapi bertanduk harus dipisahkan dari sapi yang tidak bertanduk, dinding dan pintu kandang harus bersisi halus dan bebas dari segala proyeksi yang bisa melukai ternak tersebut.

Beberapa negara bagian juga menerapkan peraturan khusus terkait kesrawan ini. Sebagai contoh di wilayah New South Wales, rujukan tambahan kesrawan di wilayah ini adalah *the Prevention of Cruelty Towards Animals Act* (POCTA). Demi memastikan bahwa daging dan produk daging untuk konsumsi manusia memenuhi persyaratan keamanan pangan dan sehat, dalam POCTA sapi potong dibedakan dari hewan lain, dengan mengkategorikannya dalam hewan stok atau hewan persediaan untuk kebutuhan pangan. Pengecualian ini membuat posisi sapi potong murni dalam konteks komoditas untuk digunakan manusia sehingga kondisi sapi tersebut harus prima karena menyangkut kepentingan kesehatan manusia. Aturan mengenai produksi higienis dan transportasi produk daging dan daging untuk konsumsi manusia diatur dalam Peraturan Pangan 2004 (NSW). Berdasarkan peraturan ini persyaratan pangan mengharuskan ternak untuk konsumsi manusia adalah hewan yang diperlakukan sesuai standar kesrawan.<sup>25</sup>

Australia merupakan negara terdepan dalam implementasi kesrawan, terutama yang terkait dengan hewan ternak. Australia juga memimpin dalam pengembangan standar kesejahteraan industri peternakan dan menjadi kontributor yang kuat untuk proses OIE dalam perlindungan satwa, status kesehatan dan perdagangan besar pada hewan dan produk hewan.<sup>26</sup> Australia berupaya menerapkan prinsip kesrawan tersebut, tidak hanya di negaranya tetapi juga ke negara-negara tujuan impor ternaknya. Secara berkelanjutan tim verifikasi Australia berkunjung ke RPH yang telah ditetapkan sebagai lokasi pemotongan sapi Australia. Pihak Australia akan memberikan sejumlah bimbingan teknis dan pandangan terkait standar (pemotongan hewan). RPH yang tidak sesuai dengan standar dan prinsip kesrawan Australia akan dilarang memotong sapi dari negaranya.

Lembaga swadaya masyarakat pendukung kesrawan tumbuh subur dan mempunyai akses politik yang kuat terhadap pemerintahan Australia. Mereka berafiliasi kepada Partai Hijau dan Partai independen di parlemen, sehingga pengaruh mereka secara politis cukup kuat. Penghentian ekspor ternak sapi ke luar negeri ke negara tertentu dengan alasan kesrawan bukan

---

<sup>25</sup> Shaman K, "Farm Animal and Welfare Law: an Unhappy Union" dalam Sankoff P and White (Eds.) *Animal Law in Australia, 2009 Federation Press, Sydney*, p. 4.8

<sup>26</sup> [Animal welfare You are here: Home / About the red meat industry / Animal welfare](http://www.mla.com.au/About-the-red-meat-industry/Animal-welfare) <http://www.mla.com.au/About-the-red-meat-industry/Animal-welfare>, diakses 28 Maret 2012.

terjadi dengan Indonesia saja. Pemerintahan Australia juga pernah menghentikan ekspor ternak sapi ke Mesir di tahun 2006 pada masa Pemerintahan PM John Howard. Selama sekitar tujuh bulan Australia menghentikan ekspor sapi ke Mesir setelah penayangan film yang menggambarkan pemotongan ternak Australia secara kejam di negara tersebut hingga tercapai kesepakatan antara kedua negara.<sup>27</sup>

Dengan kondisi kesrawan yang telah tertata baik di dalam negeri Australia tersebut, tayangan penyiksaan sapi Australia di Indonesia yang disiarkan oleh ABC menimbulkan dampak besar pada opini publik di Australia. Hal ini menjadi konsumsi politik dan mempengaruhi opini publik Australia terhadap Pemerintahan Perdana Menteri Julia Gillard. Menghadapi tuntutan yang semakin keras agar menerapkan larangan menyeluruh terhadap ekspor segala binatang hidup ke Indonesia dan mempertimbangkan kepentingan politik pemerintahannya, PM Gillard menghentikan ekspor sapi Australia ke Indonesia. Posisi partai buruh yang kurang baik diharapkan bisa menjadi lebih baik dengan "mendengarkan" suara suara pendapat publik tersebut. Banyak pihak melihat langkah yang diambil pemerintah Partai Buruh PM Jullia Gillard adalah sebagai *lip service* untuk para pendukungnya demi kelangsungan politik. Mengingat pemerintahannya tengah mengalami berbagai polemik politik beberapa minggu terakhir ini, diantaranya kasus Malaysia, pelayanan masyarakat, masalah kesehatan dan kependudukan.<sup>28</sup>

Namun penghentian penjualan sapi hidup ditengarai bukan cuma pada masalah perlakuan terhadap sapi. Lebih jauh dari itu permasalahan utamanya adalah adanya upaya dari produsen daging di Australia untuk meningkatkan ekspor daging beku ke Indonesia. Selama ini pengadaan daging di Indonesia dipenuhi dengan cara impor sapi hidup bakalan dan sisanya daging beku. Sapi dengan berat dibawah 350 kg itu, kemudian di gemukan oleh perusahaan-perusahaan penggemukan atau Feedlot di Indonesia. Setelah gemuk, baru sapi dipotong di RPH pemerintah ataupun RPH milik perusahaan feedlot sendiri. Dengan mengekspor daging beku Australia akan lebih untung sebab jelas hal ini menjadi akan memberi nilai tambah dan pembukaan lapangan kerja lebih besar di negaranya.

Reaksi keras publik Australia terhadap tayangan di televisi Australia itu, ditindaklanjuti secara politik oleh dua anggota parlemen mitra koalisi Partai Buruh yang berkuasa yaitu Andrew Wilkie (Independen) dan Adam Bandt

---

<sup>27</sup> The carnage begins on the boat <http://www.smh.com.au/environment/animals/the-carnage-begins-on-the-boat-20110604-1fm2i.html>, diakses 1 Maret 2012.

<sup>28</sup> Arya Widyatmoko, Direktorat Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri, dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan P3DI tanggal 24 April 2012.

(Partai Hijau) segera meluncurkan dua rancangan undang-undang (*private member bills*), yaitu masing-masing *Live Animal Export Restriction and Prohibition Bill 2011* dan *Live Animal Export (Slaughter) Prohibition Bill 2011*. Kedua rancangan dimaksud pada intinya mengusulkan pengurangan bertahap jumlah ekspor ternak hidup menuju penghentian total pada 2014, dengan memperhatikan standar kesejahteraan hewan pada *supply chain* (*feedlot*, transportasi, RPH).

Di lain pihak, Pemimpin Koalisi Nasional Nigel Scullion menolak penghentian ekspor karena dampak sosial ekonomi yang dirasakan para peternak sapi di pedesaan Australia. Australia mengekspor 700.000 ternak setiap tahunnya dan sebagian besar dengan tujuan Indonesia. Nilai perdagangan ekspor sapi hidup ke Indonesia diperkirakan sekitar Rp3 triliun per tahunnya.<sup>29</sup> Australia telah mengirim lebih dari 6,5 juta ekor sapi ke Indonesia untuk dipotong selama 20 tahun terakhir dan diperkirakan 40% dari daging sapi dimakan di Indonesia berasal dari sapi Australia. Upaya Pemerintah federal membayar kompensasi bagi kerugian yang diderita peternak akibat penghentian ekspor sapi ke Indonesia dianggap tidak cukup untuk mengganti kerugian peternak, sehingga hal ini menjadi isu politik kembali.

Indonesia merupakan pasar yang sangat penting, tidak hanya karena nilai ekspornya yang besar, tetapi iklim Indonesia cocok bagi ternak sapi Australia sehingga kemitraan bisnis peternakan dengan Indonesia juga menjadi tujuan bisnis Australia di masa depan. Beberapa daerah di Indonesia seperti di NTB dan NTT memiliki kondisi alam yang mirip dengan daerah peternakan sapi di Australia Utara. Pemerintah kedua negara telah sepakat untuk memperluas kerjasama ekonomi di bidang investasi peternakan sapi. Investor Australia saat ini telah mulai masuk di industri penggemukan sapi di Indonesia. Konsep yang ditawarkan Pemerintah Indonesia cukup bagus, yaitu menjadikan Indonesia sebagai basis peternakan sapi untuk memasok pasar ekspor dunia. Hal ini akan sangat menguntungkan pihak Australia karena biaya produksi di Indonesia lebih murah. Keunggulan Indonesia adalah pada harga pakan dan ketersediaan tenaga kerja murah.<sup>30</sup>

Senator Bill Heffernan Liberal yang menjadi ketua Urusan Pedesaan dan Transportasi Komite Referensi Senat Australia menolak penghentian impor sapi ke Indonesia dan merekomendasikan bantuan lebih lanjut bagi para

---

<sup>29</sup> Indonesia tak khawatir dengan larangan ekspor sapi Terbaru 9 Juni 2011 - 14:36 WIB [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2011/06/110609\\_sapi.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/06/110609_sapi.shtml), diakses 28 Maret 2012.

<sup>30</sup> RI-Australia Kerjasama Investasi Sapi Perlu Konsistensi Kebijakan, *Suara Pembaruan*, 4 Juli 2012, hlm. 9.

peternak yang merugi akibat suspensi perdagangan ternak ke Indonesia.<sup>31</sup> Pemerintah Australia akhirnya membuka kembali ekspor sapi ke Indonesia dengan beberapa kompromi. Pemerintah Australia pada tanggal 21 Oktober 2011 menerapkan panduan baru bagi eksportir Australia dan importir Indonesia dalam menjamin kesejahteraan sapi mereka. Pedoman eksportir tersebut menempatkan kontrol dan audit secara independen pada rantai ekspor sapi Australia sesuai standar kesejahteraan hewan internasional. Diantaranya eksportir diwajibkan melacak hewan mereka dari sumber pasok hingga ke rumah pemotongan hewan. Rumah pemotongan hewan di Indonesia akan dimonitor secara independen.<sup>32</sup>

## **b. Indonesia**

Berbeda dengan Australia, di Indonesia sapi belum dikembangkan dalam skala industri peternakan besar.<sup>33</sup> Umumnya sapi dipelihara di pedesaan dengan ladang penggembalaan terbatas atau dikandangkan di dekat rumah. Hal ini disebabkan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia, hewan ternak merupakan ‘tabungan hidup’ yang akan dijual hanya pada saat diperlukan. Sapi juga menjadi alat kerja dalam membajak sawah maupun tenaga angkutan. Sebagian besar usaha budidaya sapi di Tanah Air dilakukan dalam skala kecil atau rumah tangga. Ternak sapi lebih banyak menjadi usaha sampingan, disamping pertanian, sehingga tidak efisien karena *potensial loss* dari pemeliharaan sapi seringkali tidak dihitung.<sup>34</sup> Bahkan di provinsi NTB yang merupakan salah satu provinsi penghasil ternak sapi di Indonesia, pengelolaan peternakan sapi masih dilaksanakan secara tradisional di kandang kolektif dan dilepas di padang rumput savanah, belum dalam skala industri modern karena terkendala kesulitan pakan.<sup>35</sup>

Di Indonesia masalah kesrawan telah diatur dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Definisi kesrawan di Indonesia menurut undang-undang ini adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan orang atau

---

<sup>31</sup>Senat inquiry, Mary Goode, Matt Brann and Paul Sutherland, 24 November 2011. <http://www.abc.net.au/rural/news/content/201111/s3374593.htm>. diakses 28 Maret 2012.

<sup>32</sup> Wawancara dengan drh. Djuned, Kalitbang RPH Cakung PD Pasarjaya Jakarta, tanggal 18 April 2012.

<sup>33</sup> Thomas Sembiring, Ketua ASPIDI, dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan oleh Bagian Perancangan Undang-Undang Bidang Industri dan Perdagangan, tanggal 4 April 2012.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Prof. Kardono, Dosen Universitas Mataram dan DR Erawan, Pembantu Dekan I Fakultas Peternakan Universitas Mataram tanggal 2 Mei 2012.

<sup>35</sup> NTB memiliki slogan “Bumi Sejuta Sapi”, wawancara dengan Karim Marabesi, Kasusbdit Bidang Peternakan Bappeda Provinsi NTB, tanggal 30 April 2012.

badan hukum yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia. Sesuai dengan amanat undang-undang tersebut, bahwa pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong. Di samping itu mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan. Ketentuan mengenai kesrawan dilakukan secara manusiawi yang meliputi penanganan dan penangkapan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan, pengangkutan hewan, penggunaan dan pemanfaatan hewan, dan lain-lain. Penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kesrawan diatur dengan Peraturan Menteri. Selain daripada itu Indonesia juga telah memiliki standar halal yang juga memasukkan prinsip kesrawan.

Namun pengakuan secara *de jure* tersebut masih diatas kertas, karena secara *de facto* peternak Indonesia masih banyak yang belum mengenal maupun mengapresiasi prinsip-prinsip kesrawan dalam sistem produksi ternak dan kesehatan hewannya. Pelaksanaan kesrawan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Australia maupun negara-negara maju lainnya. Harus diakui pelaksanaan kesrawan di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan standard OIE karena standar tinggi di negara maju tidak begitu saja mudah ditransformasi ke dalam sistem negara berkembang.

Kekerasan terhadap ternak juga masih berlangsung di setiap tahapan selama proses penyembelihan berlangsung. Pada umumnya sapi dipotong di Tempat Potong Hewan (TPH) yang masih menjalankan sistem tradisional, juga sering kali ternak diperlakukan kasar, menyaksikan langsung sesamanya disembelih, serta tidak dipraktikkannya proses pemingsanan ternak sebelum dipotong (*stunning*). Sedangkan Rumah Potong Hewan (RPH) modern yang menerapkan prinsip *safety, security, assurance dan animal welfare* (2S 2A) belum banyak berdiri. Sedangkan RPH yang sudah ada juga masih merugi karena belum digunakan sesuai kapasitasnya, sebab masyarakat masih lebih senang memotong di TPH.<sup>36</sup> Aspek penegakan hukum agar setiap TPH patuh terhadap peraturan pemerintah masih sulit dilaksanakan karena masih lemahnya pengawasan kementerian pertanian.<sup>37</sup> Selain daripada itu belum

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan drh. Djuned, Kalitbang RPH Cakung PD Pasarjaya Jakarta, tanggal 18 April 2012.

<sup>37</sup> Sri Nastiti Budianti, Direktur Kerja Sama Bilateral, Dirjen KPI Kementerian Perdagangan Indonesia, dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan di P3DI tanggal 24 April 2012.

ada mekanisme "*reward and punishment*" terhadap RPH yang telah beroperasi sesuai standar kesrawan.<sup>38</sup> Padahal Regulasi di Indonesia terkait pemotongan hewan sudah tertuang dalam UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang tertuang dalam Bab VI Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Pada Pasal 61 (1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong dan mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Juga telah ada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/Ot.140/1/2010 Tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (*Meat Cutting Plant*) yang mempersyaratkan pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.

Moda transportasi dari sentra produksi ke sentra konsumsi juga dapat dikatakan belum sesuai dengan standard OIE.<sup>39</sup> Penggunaan gerbong kereta api untuk angkutan sapi sudah sangat berkurang, bahkan hampir tidak dilakukan lagi karena gerbong rusak dan tidak ada pengadaan gerbong baru.<sup>40</sup> Dilain pihak sebagai negara kepulauan transportasi sapi antar pulau dengan kapal laut sudah menjadi kebutuhan pokok. Namun, jenis kapal yang ada tidak dirancang khusus untuk angkutan ternak. Ternak hanya dianggap sebagai *return cargo*. Dengan demikian sejak awal pemuatan di pelabuhan keberangkatan sampai pembongkaran di pelabuhan tujuan, tidak tersedia fasilitas tangga khusus dan tempat penyajian pakan dan minum ternak yang memadai.<sup>41</sup> Akibatnya sapi mengalami *stress* dan terjadi penurunan berat hingga berkisar 11-12 persen. Belum efisiensinya transportasi sapi ke sentra konsumsi juga menyebabkan harga sapi lokal tidak mampu bersaing dengan sapi impor Australia.<sup>42</sup> Australia memiliki kapal laut khusus untuk membawa ternak sapi ke negara-negara tujuan ekspor sehingga kematian sapi selama dalam perjalanan relatif kecil.<sup>43</sup>

Dalam penelitian di NTB dan Jawa Timur, anggapan bahwa masyarakat Indonesia mengesampingkan masalah kesrawan ditolak. Negara-negara berkembang, seperti Indonesia, berbeda dengan negara-negara maju dalam memberi manfaat terhadap peternakan sapi mereka. Perbedaan

---

<sup>38</sup> Sudirman, Pengelola RPH Modern Banyumuleg di NTB, pada tanggal 30 April 2012.

<sup>39</sup> Cicik Suhartini, Kasubdit Pertanian dan Kelautan Jatim pada tanggal 7 Mei 2012.

<sup>40</sup> Iskandar, Kadis Peternakan NTB, tanggal 5 Mei 2012.

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> Wawancara dengan Prof. Kardono, Dosen Universitas Mataram dan DR Erawan, .

<sup>43</sup> Wawancara dengan. Nur Hartanto, Kabid pengawasan karantina Hewan Jatim, tanggal 8 Mei 2012.

tersebut tidak dapat dipergunakan oleh negara maju sebagai alat politik, yaitu alat untuk membuat negara-negara berkembang patuh pada keinginan negara-negara maju.<sup>44</sup>

Pelaksanaan kesrawan maupun perlakuan manusia terhadap hewan dipengaruhi kepercayaan, nilai-nilai budaya dan kemampuan ekonomi. Bagi sebagian masyarakat agraris di Indonesia manfaat sapi tidak hanya dilihat dari dagingnya, seringkali sapi menjadi terlalu berharga untuk dikonsumsi karena diperlukan tenaganya, bernilai investasi tinggi dan bisa menaikkan status pemilik. Sebagai contoh, di Pulau Sapudi Madura sapi dianggap barang yang sangat berharga dari sisi ekonomi dan status sosial. Sapi untuk dijadikan sapi karapan atau sapi untuk kontes kecantikan (sonok) memiliki nilai sangat tinggi karena menjadi bagian dari tradisi dan kesenangan.<sup>45</sup>

Pada umumnya aspek kesrawan yang paling diperhatikan di Indonesia adalah mengutamakan kebutuhan pakan dan air untuk hewan tersebut, sementara masalah kenyamanan dan pertimbangan perasaan hewan dari rasa takut dan tertekan masih kurang mendapat perhatian. Seperti yang terjadi di NTB, salah satu provinsi penghasil sapi di Indonesia, terdapat istilah "sapi makan kambing" karena demi memberi makan sapi peternak rela menjual ternak kambingnya.<sup>46</sup> Demikian berharganya sapi sehingga seringkali mereka dikandangkan di samping rumah peternak untuk menghindari kecurian.

Di lain pihak kebutuhan konsumen akan RPH modern yang telah sesuai dengan standar kesrawan belum tinggi. Segmen pasar daging impor Australia di Indonesia masih terbatas karena konsumen Indonesia lebih menyukai daging basah yang disukai karena dianggap lebih segar.<sup>47</sup> Tempat pemotongan hewan (TPH) atau pejagalan tradisional merupakan tempat yang cocok untuk mendapatkan daging kriteria tersebut karena sapi yang dipotong adalah sapi berbadan kecil atau sapi lokal yang akan habis terserap pasar setiap hari sehingga tidak perlu disimpan atau dibekukan. Setiap hari pejagalan tradisional harus memotong sapi baru sehingga kebutuhan masyarakat akan daging segar. Konsumen juga belum tersosialisasikan kesrawan sehingga hanya melihat kualitas kesegaran daging tanpa mempedulikan cara pemotongan sapi. Masyarakat di Jawa Timur misalnya, lebih percaya kepada pejagalan tradisional karena bisa dilihat proses penyembelihannya

---

<sup>44</sup> Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work*, (terjemahan Edrijani Azwadi), Bandung: Mizan, 2007, hlm.148 -151.

<sup>45</sup> "Haji dan Kuliah Anak Pun Dibiayai dari Sapi", *Kompas*, 5 Mei 2012, hlm. 24.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Prof. Kardono Dosen Universitas Mataram dan DR Erawan, *op.cit*.

<sup>47</sup> Prof Mulatno dkk, staf pengajar Fakultas Peternakan IPB, dalam *Focus Group Discussion* yang diselenggarakan P3DI tanggal 23 April 2012.

dan kepercayaan terhadap keahlian jagal tradisional juga masih kuat dibandingkan RPH modern.<sup>48</sup>

#### **4. Pengaruh Isu Kesejahteraan Hewan Dalam Hubungan Bilateral Indonesia – Australia**

Hubungan perdagangan bilateral RI-Australia telah menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahunnya. Kepala Pemerintahan kedua negara telah menetapkan untuk mencapai target volume perdagangan bilateral USD 15 milyar pada tahun 2015. Dimana, salah satu industri yang menarik untuk dikembangkan adalah peternakan sapi yang sangat maju di Australia.

---

<sup>48</sup> Wawancara dengan staf Kadin Jawa Timur tanggal 8 Mei 2012 dan Eko serta Bambang Ali, Dosen Fakultas peternakan Universitas Brawijaya tanggal 11 Mei 2012.

**Tabel. 1**  
**Nilai Perdagangan Bilateral RI-Australia, 2007-2011**  
**(dalam ribu USD)**

Description	2007	2008	2009	2010	2011	Trend % 2007- 2011	Jan-Des		Change % 2010- 2011
							2010	2011	
Total trade	6.398.569,3	8.108.503,6	6.700.239,8	8.343.435,5	10.759.599,0	11,27	8.343.435,5	10.759.599,0	28,96
Oil & gas	1.713.593,9	2.020.496,2	1.614.470,8	1.887.158,9	2.507.538,1	7,18	1.887.158,9	2.507.538,1	32,87
Non oil & gas	4.684.975,3	6.088.007,4	5.085.769,0	6.456.276,6	8.252.061,0	12,65	6.456.276,6	8.252.061,0	27,81
Export	3.394.557,3	4.110.969,6	3.264.224,7	4.244.396,9	5.582.530,0	10,81	4.244.396,9	5.582.530,0	31,53
Oil & gas	1.526.683,0	2.003.504,3	1.552.577,4	1.881.028,9	2.504.078,6	9,71	1.881.028,9	2.504.078,6	33,12
Non oil & gas	1.867.874,3	2.107.465,3	1.711.647,3	2.363.368,1	3.078.451,5	11,78	2.363.368,1	3.078.451,5	30,26
Import	3.004.012,0	3.997.534,0	3.436.015,1	4.099.038,5	5.177.069,0	11,78	4.099.038,5	5.177.069,0	26,30
Oil & gas	186.910,9	16.991,9	61.893,5	6.130,0	3.459,5	-59,34	6.130,0	3.459,5	-43,56
Non oil & gas	2.817.101,0	3.980.542,1	3.374.121,6	4.092.908,5	5.173.609,5	13,24	4.092.908,5	5.173.609,5	26,40
Balance of trade	390.545,3	113.435,6	-171.790,4	145.358,4	405.461,0	0,00	145.358,4	405.461,0	178,94
Oil & gas	1.339.772,1	1.986.512,4	1.490.683,9	1.874.898,8	2.500.619,1	12,64	1.874.898,8	2.500.619,1	33,37
Non oil & gas	-949.226,7	1.873.076,8	1.662.474,3	1.729.540,4	-2.095.158,1	0,00	-1.729.540,4	-2.095.158,1	21,14

Sumber: Kementerian Perdagangan RI.

Kebijakan Pemerintah Australia menghentikan sepihak ekspor sapi ke Indonesia dengan alasan kesrawan dapat dianggap melanggar berbagai kesepakatan dan kemajuan hubungan bilateral kedua negara. Penghentian sementara ekspor sapi oleh Australia merupakan cara pemaksaan dari Australia terhadap Indonesia yang tidak didasarkan pada prinsip saling menghormati kedaulatan dan non-intervensi sebagaimana yang disepakati kedua negara dalam *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* atau yang dikenal sebagai *Lombok Treaty* dalam Pasal 2 ayat 2.

Penghentian sepihak impor sapi Australia ini dapat menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia membangun peternakan sapi di dalam negeri untuk mencapai swasembada daging secara nasional. Indonesia memiliki sumber daya lokal yaitu sapi Bali yang merupakan salah satu spesies sapi terbaik di dunia.<sup>49</sup> Namun tanpa upaya pelestarian yang baik dan serbuan sapi impor Australia dapat membawa kepunahan sapi lokal Indonesia ini. Besarnya potensi sumber daya alam sapi lokal yang dimiliki Indonesia memungkinkan pengembangan sektor peternakan untuk dijadikan sumber pertumbuhan baru perekonomian Indonesia.

Sejauh ini industri peternakan sapi di Indonesia masih dilakukan dalam skala kecil dan belum terlalu menguntungkan sehingga peternak dalam negeri harus mendapat proteksi dan insentif khusus dari pemerintah.<sup>50</sup> Masuknya daging sapi impor tanpa mengakomodir kepentingan petani peternak, berdampak langsung menekan pendapatan petani di pedesaan. Sebagian besar, para peternak kecil yang ada di pedesaan belum siap menghadapi persaingan bebas dengan modal besar dari luar negeri dan barang-barang impor yang jauh lebih murah.<sup>51</sup> Berhentinya impor sapi Australia mendapat respon positif dari peternak dan pedagang sapi. Mereka berharap kondisi ekspor sapi Bali dari NTB bisa bangkit lagi seperti sebelum ada kebijakan impor sapi bakalan dari Australia.<sup>52</sup> Di Jawa Timur hal ini juga dianggap suatu peluang besar untuk meningkatkan produktivitas peternakan khususnya sapi potong.<sup>53</sup> Pemda Provinsi Jawa Timur menyikapi isu kesran dengan upaya peningkatan mutu daging untuk memberi jaminan kepada

---

<sup>49</sup> Prof Mulatno dkk, pengajar fakultas peternakan IPB, FGD P3DI tanggal 23 April 2012.

<sup>50</sup> Juan Permata Adoe, Ketua Komite Tetap Agrobisnis Peternakan KADIN, FGD PUU bidang Industri dan Perdagangan tanggal 4 April 2012, wawancara dengan Eko dan Bambang Ali, dosen fakultas peternakan Universitas Brawijaya pada tanggal 11 Mei 2012.

<sup>51</sup> Drh. R.D Wiwiek Bagya, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, FGD PUU bidang Industri dan Perdagangan tanggal 3 April 2012.

<sup>52</sup> Lalu Rizki dan jajaran Kadin NTB pada tanggal 1 Mei 2012.

<sup>53</sup> Cicik Suhartini, Kasubdit Pertanian dan Kelautan Jatim pada tanggal 7 Mei 2012.

konsumen agar mendapatkan produk ternak yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

Di lain pihak Pemerintah Federal Australia menyadari bahwa kebijakan penghentian ternak hidup berdampak merugikan bagi peternak Australia sendiri. Pemerintah Federal Australia mencabut larangan ekspor sapi ke Indonesia, namun memberikan persyaratan yang ketat dalam perizinan ekspor, mulai dari fasilitas penggemukan ternak, angkutan, hingga RPH terhadap hewan yang dikirimkan ke Indonesia. Pihak Australia juga menyampaikan tawaran proyek bantuan pemerintah di bidang peternakan. Kedua negara sepakat untuk menaruh kepercayaan penuh pada upaya Kementerian/Lembaga terkait untuk bekerjasama memperbaiki standar kesrawan pada rantai pasokan sapi hidup dari Australia ke Indonesia.

### **III. Kesimpulan dan Rekomendasi**

#### **A. Kesimpulan**

Kesejahteraan hewan merupakan upaya untuk memperlakukan hewan secara wajar, alami dan terkendali dalam kerangka perlindungan hewan dari tindakan semena-mena manusia. Dengan demikian akan tersedia hewan sebagai bahan dasar pangan dalam kondisi yang lebih baik.

Dalam perspektif hubungan internasional, isu kesrawan dapat menjadi isu sensitif karena erat kaitannya dengan faktor domestik yang tidak sama di setiap negara. Kesejahteraan hewan membawa pengaruh yang berbeda-beda pada kebijakan di setiap negara karena hal tersebut terkait dengan kemampuan ekonomi, norma dan nilai-nilai budaya yang ada dalam masyarakat di setiap negara. Diperlukan prinsip kehati-hatian dalam penerapannya karena upaya penyeragaman standar kesejahteraan hewan di setiap negara seringkali dipandang sebagai intervensi ke dalam masalah domestik. Secara umum di negara berkembang prioritas prinsip kesejahteraan hewan adalah pada kebutuhan pakan dan air, sedangkan di negara maju aspek psikologis pada hewan telah sangat diperhatikan.

Isu kesrawan adalah isu internasional yang penting untuk diperhatikan. Hal ini dapat dipolitisir untuk memberikan citra buruk yang sangat merugikan negara secara politik maupun ekonomi di kancah global. Selama isu kesrawan belum diterapkan secara benar, negara tersebut dapat menjadi sasaran kritik internasional, dengan kemungkinan terburuk jatuhnya embargo terhadap tersebut.

Indonesia merupakan negara berkembang yang belum sepenuhnya bisa menerapkan prinsip kesrawan di dalam negeri. Tradisi, budaya, keyakinan dan agama yang berkembang di Indonesia belum mendukung penerapan

kesrawan di Indonesia. Kondisi umum masyarakat yang tidak terlalu memperdulikan isu kesrawan semakin memperlambat penerapan prinsip kesrawan di Indonesia.

Dilain pihak Australia merupakan negara maju dan merupakan pelopor dalam penerapan kesrawan di dunia. Australia memiliki latar belakang sejarah budaya yang berbeda dengan Indonesia. Kondisi di dalam negeri Australia sangat mendukung perkembangan kesrawan di negara tersebut karena negara tersebut telah menikmati manfaatnya dalam industri peternakan sapi mereka. Kualitas daging sapi Australia termasuk yang terbaik dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Isu kesrawan mudah menjadi isu politik karena dalam penerapannya setiap negara mengembangkan standar mereka sendiri dengan tetap mengacu pada aturan internasional. Standar tinggi di negara maju tidak begitu saja mudah diadopsi ke negara berkembang, karena setiap negara memiliki kemampuan ekonomi, prioritas kebutuhan dan norma budaya yang berbeda-beda. Pemaksaan penerapan kesrawan sesuai standar Australia di dianggap sebagai intervensi terhadap masalah domestik Indonesia.

Isu kesrawan mempengaruhi hubungan bilateral Indonesia dan Australia. Perbedaan penerapan kesrawan di negara masing-masing telah melahirkan isu politik baru bagi kedua negara. Sebagai dua negara bertetangga dengan sejarah hubungan bilateral yang panjang kedua negara akhirnya kembali pada mekanisme konsultasi bilateral untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah RI harus memberikan pengertian kepada Pemerintah Australia bahwa tidak tepat apabila standar internasional kesrawan diadopsi begitu saja oleh negara berkembang. Setiap negara berkembang, tentunya juga Indonesia, membutuhkan waktu untuk mengembangkan standar kesrawan sesuai kemampuan dan prioritas. Tanpa adanya saling pengertian masalah ini akan selalu membawa ketegangan politik yang merugikan kedua pihak.

## **B. Rekomendasi**

Indonesia mengalami kemajuan perlahan dan sangat terbatas dalam mengembangkan, mempromosikan, dan menerapkan kaidah-kaidah kesrawan. Kondisi kesrawan di dalam negeri harus segera diperbaiki dengan kerjasama setiap pihak yang terkait, baik pemerintah, swasta dan asosiasi. Harus dilakukan edukasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang arti penting kesrawan bagi Indonesia, serta

peningkatan perbaikan sistem kesehatan hewan nasional dan peningkatan SDM di bidang kesehatan hewan.

Dalam upaya membangun kemandirian pangan, Indonesia harus segera melakukan swasembada daging sapi dengan memberikan perhatian lebih besar kepada sektor peternakan di dalam negeri. Terutama upaya melestarikan dan meningkatkan kualitas sapi Bali yang merupakan sapi asli Indonesia dan menjadi salah satu keunggulan keanekaragaman hayati di Indonesia.

Perbaikan sarana prasarana transportasi ternak yang lebih baik harus segera dilakukan, baik itu pengadaan kapal laut atau kereta api yang khusus untuk ternak. Dengan cara ini diharapkan distribusi sapi akan lebih lancar dan sapi akan sampai ke pejalagan dalam kondisi yang sehat dan sedikit penyusutan bobot.

Kerjasama Indonesia – Australia dalam membangun industri peternakan sapi di Indonesia harus segera ditindaklanjuti di daerah yang berpotensi menjadi basis peternakan sapi di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

Azrudin dan Mirza Jaka Suryana, (Eds). (2009). *Refleksi Teori Hubungan Internasional, dari Tradisional ke Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fraser, David. "Animal Ethics and Animal Welfare Science: Bridging the Two Cultures", *Elsevier Applied Animal Behaviour Science*, Vol.65, issue 3, Desember 1999.

Hermawan, Yulius P. (Ed.). (2007). *Transformasi dalam Studi Hubungan Internasional—Aktor Isu dan Metodologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mintz, Alex and Karl De Rouen Jr. (Eed.). (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.

NG, Gregory. (2007). *Animal Welfare and Meat Production*. Cromwell: Trowbridge.

Perwita, Anak Agung Banyu dan Yanyan Mochamad Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: Penerbit Rosdakarya.

Rodrik, Dani. (2011). *The Globalization Paradox*. Oxford: Oxford University Press.

Sankoff, P. and White (Eds). (2009). *Animal Law in Australia (2009)*. Sydney: Federation Press.

Spiegel, Steven L. et. al. (2009). *World Politics in a New Era*, (Fourth Edition). New York: Oxford Univ. Press.

Stiglitz, Joseph E. (2007). *Making Globalization Work*, (terjemahan Edrijani Azwadi). Bandung: Mizan.

### Surat Kabar:

"Haji dan Kuliah Anak Pun Dibiayai dari Sapi", *Kompas*, 5 Mei 2012.

"RI-Australia Kerjasama Investasi Sapi Perlu Konsistensi Kebijakan", *Suara Pembaruan*, 4 Juli 2012.

### Internet:

A.C.D Bayvel, "The globalization of animal welfare: A New Zealand and Australia perspective on recent developments of strategic importance", 2009, [http://www.daft.gov.au/data/assets/pdf\\_file/0011/1046729/08-david-bayvel.pdf](http://www.daft.gov.au/data/assets/pdf_file/0011/1046729/08-david-bayvel.pdf), diakses 2 Maret 2012.

"Animal Welfare = Trade Issue", <http://animal-law.biz/node/328>, diakses 28 Maret 2012.

"Animal welfare labeling", <http://animal-law.biz/node/35>, diakses 28 Maret 2012.

Animal welfare You are here: [Home](#) / [About the red meat industry](#) / Animal welfare <http://www.mla.com.au/About-the-red-meat-industry/Animal-welfare>, diakses 28 Maret 2012.

["Animal health, welfare & biosecurity"](http://www.mla.com.au/Livestock-production/Animal-health-welfare-and-biosecurity), <http://www.mla.com.au/Livestock-production/Animal-health-welfare-and-biosecurity>, diakses 2 Maret 2012.

["Australia's live export industry"](http://www.daff.gov.au/animal-plant-health/welfare/animal-welfare-issues/australias-live-export-industry), <http://www.daff.gov.au/animal-plant-health/welfare/animal-welfare-issues/australias-live-export-industry>, diakses 26 Januari 2012.

["Director General Office"](http://www.oie.int/en/about-us/director-general-office/), <http://www.oie.int/en/about-us/director-general-office/> diakses 28 Maret 2012.

Editorial, *Bulletin* No.2 tahun 2008, [http://www.oie.int/fileadmin/home/eng/Publications\\_%26\\_Documentation/docs/pdfBull\\_2008\\_2\\_ENG.pdf](http://www.oie.int/fileadmin/home/eng/Publications_%26_Documentation/docs/pdfBull_2008_2_ENG.pdf) diakses 2 Maret 2012.

["Five Freedoms"](http://www.defra.gov.uk/fawc/about/five-freedoms/), <http://www.defra.gov.uk/fawc/about/five-freedoms/> ["Fivefreedoms"](#)]. Farm Animal Welfare Committee. diakses 28 Maret 2012.

<http://www.dfat.gov.au/aii/publications/bab05/> diakses 29 Januari 2013.

[Indonesia tak khawatir dengan larangan ekspor sapi](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/06/110609_sapi.shtml) Terbaru 9 Juni 2011 -14:36 WIB [http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita\\_indonesia/2011/06/110609\\_sapi.shtml](http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2011/06/110609_sapi.shtml), diakses 28 Maret 2011.

"Kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) tentang Sanitari dan Fitosanitari", [http://www.daff.gov.au/data/assets/pdf\\_file/0007/146896wto\\_sps\\_agreement\\_booklet.pdf](http://www.daff.gov.au/data/assets/pdf_file/0007/146896wto_sps_agreement_booklet.pdf), diakses 27 Februari 2012.

"MLA's Animal Welfare Program", [Home](#) / [About the red meat industry](#) / Animal welfare <http://www.mla.com.au/About-the-red-meat-industry/Animal-welfare>, diakses 2 Maret 2012.

[The carnage begins on the boat](http://www.smh.com.au/environment/animals/the-carnage-begins-on-the-boat-20110604-1fm2i.html) <http://www.smh.com.au/environment/animals/the-carnage-begins-on-the-boat-20110604-1fm2i.html>, diakses 1 Maret 2012.

Senat inquiry, Mary Goode, Matt Brann and Paul Sutherland, 24 November 2011. <http://www.abc.net.au/rural/news/content/201111/53374593.htm>, diakses 28 Maret 2012

Wawan Sutian, Penyelenggaraan Kesejahteraan Hewan 21 Juli 2011, 14 September 2011, [http://karantina.deptan.go.id/index.php?Option=com\\_content&view=article&id=175:penyelenggaraan-kesejahteraan-hewan&catid=45:opini](http://karantina.deptan.go.id/index.php?Option=com_content&view=article&id=175:penyelenggaraan-kesejahteraan-hewan&catid=45:opini), diakses 28 Maret 2012.

World Trade Organization, <http://www.bsn.go.id/bsn/activity.Php?id=195> Perundingan Berjalan Lambat", <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2011/06/15/0242130/Perundingan.Berjalan.Lambat>, diakses 2 Maret 2011.

WTO Tak Campuri Pembatasan Ekspor Sapi Australia <http://arsip.gatra.com/2011-07-01/artikel.php?id=149175>, diakses 15 Juni 2011

**Lain-lain:**

Undang-undang No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

*Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011.

Meat & Livestock Australia. *Meat Standards Australia Beef Information Kit*, 2007.

